PERAN BPBD DALAM MITIGASI BENCANA LONGSOR DI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG, PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Ngalum Nickfrysher Ningdana
NPP. 33.1148
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik
Email: brezzyning@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Bertha Lubis, S.Sos., M.Si
Email: berthalubis@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *Indonesia is one of the most disaster-prone countries in the world, particularly vulnerable to landslides. Pegunungan Bintang Regency, Papua Pegunungan Province, faces high landslide risk due to its mountainous topography, high rainfall, and environmental fragility. Despite the legal mandate of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) to conduct pre-disaster mitigation, its effectiveness remains limited by institutional, geographic, and resource constraints. Existing research has inadequately addressed the specific institutional role performance of local BPBD units in remote highland regions such as Pegunungan Bintang.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the role of BPBD in landslide disaster mitigation in Pegunungan Bintang Regency, Papua Pegunungan Province.* ***Method:*** *This study employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, in-depth interviews with five informants from BPBD Pegunungan Bintang, and documentation. Data analysis followed Miles and Huberman's interactive model comprising data condensation, data display, and conclusion drawing. The theoretical framework is Edy Suhardono's role theory (1994), encompassing role expectation, role performance, role conflict, role conformity, and role congruence.* ***Result:*** *BPBD has carried out its role through socialization, contingency planning, cross-sectoral coordination, and community capacity building. However, implementation has not been optimal due to limited human resources (42 personnel covering 15,683 km²), inadequate infrastructure and equipment, budget constraints, difficult geographical terrain, low community awareness, and limited access to information and communication technology.* ***Conclusion:*** *BPBD Pegunungan Bintang has executed its role in landslide mitigation but has not yet reached full effectiveness. Stronger synergy among the government, BPBD, and the community, supported by increased budget allocation and improved technology access,is urgently needed*

Keywords: *BPBD Role; Disaster Mitigation; Landslide; PegununganBintang; Papua Pegunungan.*

ABSTRAK

Permasalahan: Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap berbagai jenis bencana alam, salah satunya tanah longsor. Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, memiliki potensi bencana longsor yang sangat tinggi akibat kondisi topografi yang bergunung-gunung, curah hujan tinggi, serta kerentanan lingkungan. Berulangnya kejadian bencana longsor di berbagai distrik setiap tahun menunjukkan bahwa upaya mitigasi yang dilakukan oleh BPBD belum berjalan secara optimal. Penelitian terdahulubelum secara khusus mengkaji dimensi peran kelembagaan BPBD di wilayah pegunungan terpencil seperti Pegunungan Bintang.**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BPBD dalam mitigasi bencana longsor di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan.**Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan lima informan dari BPBD Kabupaten Pegunungan Bintang, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Landasan teori yang digunakan adalah Teori Peran Edy Suhardono (1994) yang mencakup harapan peran, pelaksanaan peran, konflik peran, kesesuaian peran, dan keselarasan peran.**Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Pegunungan Bintang telah menjalankan perannya melalui sosialisasi kebencanaan, penyusunan rencana kontingensi, koordinasi lintas sektor, serta pemberdayaan masyarakat. Namun pelaksanaannya belum optimal karena terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia (42 pegawai untuk wilayah seluas 15.683 km²), minimnya sarana prasarana, keterbatasan anggaran, kondisi geografis yang sulit dijangkau, rendahnya kesadaran masyarakat, serta terbatasnya akses informasi dan teknologi komunikasi.**Kesimpulan:** Peran BPBD dalam mitigasi bencana longsor di Kabupaten Pegunungan Bintang sudah berjalan namun belum maksimal. Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, BPBD, dan masyarakat, disertai peningkatan alokasi anggaran dan akses teknologi, guna meningkatkan efektivitas mitigasi bencana.

Kata kunci: Mitigasi Bencana; Papua Pegunungan; Pegunungan Bintang; Peran BPBD; Tanah Longsor.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap berbagai jenis bencana alam akibat posisinya yang berada di cincin api Pasifik (Ring of Fire). Salah satu bencana alam yang kerap terjadi dan menimbulkan kerugian besar adalah tanah longsor, terutama di daerah pegunungan dengan topografi curam dan curah hujan tinggi. Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerentanan longsor tertinggi di Indonesia bagian timur.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pegunungan Bintang, kejadian bencana longsor terus berulang setiap tahun. Pada periode 2021–2025, bencana longsor dan banjir tercatat terjadi di berbagai distrik seperti Distrik Oksibil, Okbab, Alemsom, Pamek, dan Serambakon, mengakibatkan korban jiwa, pengungsian ribuan warga, kerusakan infrastruktur, serta terputusnya akses jalan. Kondisi ini diperparah oleh kondisi geografis wilayah yang bergunung-gunung dan sulit dijangkau, sehingga proses evakuasi dan distribusi bantuan seringkali mengalami hambatan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai landasan hukum utama dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana. Berdasarkan peraturan ini, BPBD dibentuk sebagai lembaga pelaksana penanggulangan bencana di tingkat daerah yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu pra-bencana (pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan), tanggap darurat, dan pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Dalam konteks mitigasi bencana longsor, peran BPBD menjadi sangat krusial karena bertanggung jawab dalam upaya pengurangan risiko sebelum bencana terjadi.

BPBD Kabupaten Pegunungan Bintang saat ini memiliki 42 pegawai (38 PNS dan 4 PPPK) untuk mengelola wilayah seluas 15.683 km² yang terdiri dari berbagai distrik dan kampung dengan aksesibilitas yang sangat terbatas. Kesenjangan antara beban tugas dan kapasitas kelembagaan ini menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan peran BPBD, khususnya dalam kegiatan mitigasi bencana.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Kesenjangan masalah yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih belum optimalnya pelaksanaan mitigasi bencana longsor oleh BPBD Kabupaten Pegunungan Bintang, padahal wilayah tersebut memiliki tingkat kerawanan longsor yang tinggi dan kejadian bencana terus berulang setiap tahun. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan peran BPBD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dengan kemampuan pelaksanaan di lapangan yang masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, serta kondisi geografis yang sulit dijangkau. Selain itu, penelitian terdahulu lebih banyak dilakukan di wilayah yang memiliki aksesibilitas dan kapasitas kelembagaan yang lebih baik, sehingga kajian mengenai peran BPBD dalam mitigasi bencana longsor di wilayah pegunungan terpencil seperti Kabupaten Pegunungan Bintang masih sangat terbatas

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena bencana longsor di Kabupaten Pegunungan Bintang terus berulang setiap tahun dan menimbulkan kerugian yang signifikan. Pemahaman mendalam tentang peran BPBD diperlukan sebagai dasar perumusan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih efektif. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, pemerintah daerah dan BPBD akan kekurangan basis empiris yang kuat untuk menyusun strategi mitigasi yang tepat sasaran. Akibatnya, upaya pengurangan risiko bencana berisiko tidak efektif dan masyarakat akan terus menghadapi ancaman bencana longsor tanpa perlindungan yang memadai.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada sejumlah kajian terdahulu yang membahas peran BPBD dalam penanggulangan bencana. Fajar & Usman (2023) mengkaji responsivitas BPBD Kabupaten Aceh Timur dalam menghadapi bencana banjir menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD telah responsif melalui pelaksanaan tanggap darurat berupa evakuasi korban, distribusi bantuan logistik, dan koordinasi lintas sektor bersama TNI, Polri, serta instansi terkait. Persamaannya terletak pada fokus kajian peran dan responsivitas BPBD dalam penanggulangan bencana, sementara perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan jenis bencana yang dikaji, di mana penelitian ini secara khusus mengkaji mitigasi bencana longsor di Kabupaten Pegunungan Bintang yang memiliki karakteristik geografis ekstrem dan akses yang sangat terbatas.

Kuntjorowati (2020) meneliti kontribusi aktivitas seismik terhadap kejadian tanah longsor di Kabupaten Pegunungan Bintang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa kejadian tanah longsor di wilayah tersebut juga dapat dipicu oleh aktivitas seismik selain faktor curah hujan dan kondisi topografi. Persamaannya adalah sama-sama meneliti fenomena tanah longsor di Kabupaten Pegunungan Bintang, sementara perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian terdahulu menganalisis faktor pemicu geologis, sedangkan penelitian ini mengkaji peran kelembagaan BPBD dalam upaya mitigasi bencana longsor menggunakan teori peran Edy Suhardono (1994).

Tri Anjani Nur Faidah, dkk (2019) menganalisis komunikasi efektif sebagai upaya penanggulangan bencana alam di Kota Padangsidimpuan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh BPBD Kota Padangsidimpuan dalam meminimalisir korban jiwa telah berlangsung secara efektif, sederhana, singkat, dan langsung kepada sasaran. Persamaannya terletak pada kajian tindakan BPBD dalam menghadapi bencana alam, sementara perbedaannya terletak pada aspek yang dikaji, di mana penelitian terdahulu berfokus pada efektivitas komunikasi kebencanaan di wilayah perkotaan, sedangkan penelitian ini mengkaji secara menyeluruh peran BPBD dalam mitigasi bencana longsor di wilayah terpencil dengan segala hambatan dan keterbatasannya.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah *(novelty)* yang secara substansial membedakannya dari kajian-kajian terdahulu melalui tiga aspek utama:Pertama, dari segi lokasi dan konteks objek penelitian: penelitian ini merupakan kajian yang secara spesifik menganalisis peran BPBD dalam mitigasi bencana longsor di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Wilayah ini memiliki karakteristik geografis berupa pegunungan terjal, topografi ekstrem, curah hujan tinggi, dan keterisolasian akses infrastruktur yang sangat khas. Kondisi ini sangat berbeda dengan lokus penelitian terdahulu yang umumnya mengkaji wilayah dengan aksesibilitas lebih memadai, seperti Kabupaten Aceh Timur pada penelitian Fajar & Usman (2023) maupun Kota Padangsidimpuan pada penelitian Tri Anjani Nur Faidah, dkk (2019).

Kedua, dari segi pendekatan analisis dan operasionalisasi teori: penelitian ini menggunakan teori peran Edy Suhardono (1994) yang mencakup lima dimensi yakni harapan peran, pelaksanaan peran, konflik peran, kesesuaian peran, dan keselarasan peran, yang diaplikasikan secara kontekstual untuk menganalisis peran kelembagaan BPBD di wilayah terpencil dengan keterbatasan sumber daya ekstrem. Kebaruan teoritis yang menonjol adalah bahwa penelitian terdahulu seperti Kuntjorowati (2020) menganalisis longsor dari perspektif geologis-seismik, sementara penelitian ini mengkaji longsor dari perspektif kelembagaan dan peran organisasi pemerintah daerah. Lebih jauh, penelitian ini berhasil mengungkap fenomena belum optimalnya pelaksanaan peran BPBD akibat hambatan struktural berupa keterbatasan SDM, anggaran, sarana prasarana, serta kondisi geografis yang tidak ditemukan secara komprehensif pada studi-studi sebelumnya.

Ketiga, dari segi kebijakan dan integrasi data**:** temuan penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap literatur, melainkan menghadirkan kebaruan data berupa analisis tren kejadian bencana longsor di Kabupaten Pegunungan Bintang periode 2021–2025 yang terus mengakibatkan kerusakan infrastruktur, kerugian material, dan korban jiwa. Data empiris teraktual ini menjadi basis argumentasi ilmiah yang kuat bagi pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan mitigasi bencana yang lebih responsif, taktis, dan akomodatif terhadap karakteristik lokal wilayah pegunungan terpencil di Papua Pegunungan.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BPBD dalam mitigasi bencana longsor di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dipilih karena peneliti bertujuan memperoleh pemahaman mendalam tentang peran BPBD dalam mitigasi bencana longsor, bukan sekadar mengukur variabel secara numerik. Pendekatan ini dinilai paling tepat untuk menangkap kompleksitas fenomena kelembagaan yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui data angka.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik: (1) Observasi langsung di kantor BPBD Kabupaten Pegunungan Bintang dan wilayah rawan bencana; (2) Wawancara mendalam dengan 5 informan yang dipilih secara purposive berdasarkan peran dan keterlibatan mereka dalam penanggulangan bencana; dan (3) Dokumentasi berupa data kejadian bencana, laporan kegiatan, dan regulasi terkait.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pegunungan Bintang (I1), dipilih karena memiliki kewenangan tertinggi dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan operasional penanggulangan bencana. Informan pendukung meliputi Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (I2), Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (I3), Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (I4), serta Sekretaris BPBD (I5). Kombinasi informan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dari seluruh aspek pelaksanaan mitigasi bencana.

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber (membandingkan informasi dari berbagai informan) dan triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi). Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Penelitian dilaksanakan di Kantor BPBD Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, pada bulan Oktober–November 2025, selama kurang lebih dua bulan.

Landasan teori yang digunakan adalah Teori Peran Edy Suhardono (1994) dengan lima dimensi analisis: (1) Harapan Peran (Role Expectation)ekspektasi terhadap fungsi dan tujuan BPBD; (2) Pelaksanaan Peran (Role Performance)realisasi nyata tugas mitigasi; (3) Konflik Peran (Role Conflict)hambatan dan pertentangan dalam pelaksanaan tugas; (4) Kesesuaian Peran (Role Conformity)tingkat kesesuaian antara harapan dan pelaksanaan; serta (5) Keselarasan Peran (Role Congruence)harmoni antara peran yang dijalankan dan ekspektasi stakeholder.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran BPBD dalam mitigasi bencana longsor di Kabupaten Pegunungan Bintang menggunakan Teori Peran Edy Suhardono (1994) yang mencakup lima dimensi. Adapun pembahasan masing-masing dimensi diuraikan pada subbab berikut.

3.1. Harapan Peran (Role Expectation)

Dimensi harapan peran mengkaji sejauh mana BPBD memahami fungsi, tujuan, aturan, dan batas wewenangnya dalam mitigasi bencana longsor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Pegunungan Bintang telah memahami dengan baik

tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Hal ini tercermin dari pelaksanaan berbagai program mitigasi seperti sosialisasi kebencanaan, edukasi masyarakat, pemetaan wilayah rawan longsor, penyusunan rencana kontingensi, serta simulasi kebencanaan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Pegunungan Bintang menyatakan: "Peran BPBD dalam mitigasi bencana longsor difokuskan pada upaya pencegahan melalui sosialisasi, edukasi, dan simulasi kepada masyarakat sebelum bencana terjadi. Peran tersebut juga mencakup pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai wilayah rawan bencana serta larangan melakukan aktivitas di daerah berisiko."

Meskipun pemahaman terhadap harapan peran sudah baik, pelaksanaannya terkendala oleh keterbatasan anggaran dan personel yang menyebabkan kegiatan mitigasi belum dapat menjangkau seluruh wilayah rawan longsor secara merata di semua distrik. BPBD memiliki harapan besar dari masyarakat dan pemerintah daerah untuk mampu melaksanakan kegiatan mitigasi secara menyeluruh, namun kondisi riil di lapangan belum sepenuhnya memungkinkan hal tersebut.

3.2. Pelaksanaan Peran (Role Performance)

Dimensi pelaksanaan peran mengkaji bagaimana BPBD secara nyata menjalankan tugasnya dalam mitigasi bencana longsor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD telah melaksanakan berbagai kegiatan mitigasi pra-bencana, meliputi:

Pertama, sosialisasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat di wilayah rawan longsor, meskipun belum menjangkau seluruh distrik dan kampung karena keterbatasan akses dan personel. Kedua, pemetaan wilayah rawan bencana sebagai dasar perencanaan mitigasi. Ketiga, penyusunan rencana kontingensi bencana sesuai Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2014. Keempat, koordinasi lintas sektor dengan TNI, Polri, Dinas PU, Dinas Kesehatan, serta pemerintah distrik dan kampung.

Kepala BPBD menyatakan: "Setiap bidang memiliki tanggung jawab masing-masing, dan kami tetap berupaya menjalankan tugas tersebut secara optimal meskipun dalam kondisi yang terbatas, karena penanganan bencana merupakan tanggung jawab bersama."

Dari segi tanggap darurat, BPBD telah melakukan respons cepat melalui evakuasi korban, pendistribusian bantuan logistik, serta koordinasi lintas sektor saat terjadi bencana. Data menunjukkan bahwa pada kejadian longsor di Distrik Pamek (April 2024), BPBD berhasil melakukan koordinasi yang menyebabkan 1.659 jiwa mengungsi dengan selamat. Namun, respons tersebut kerap terkendala oleh kondisi geografis yang sulit dijangkau dan keterbatasan peralatan operasional.

Tabel 1.

Data Kejadian Bencana dan Dampaknya Tahun 2021-2025 di Kabupaten Pegunungan Bintang

Tahun	Lokasi Kejadian	Dampak / Catatan
2025	Kampung Landakma	Longsor pada 7 Maret 2025
2024	Distrik Pamek Borban	Longsor 14 April 2024, 1.659 jiwa mengungsi

Tahun	Lokasi Kejadian	Dampak / Catatan
2024	Distrik Alemsom	Longsor + banjir, 16 Januari 2024, warga mengungsi
2023	Distrik Okbab & Alemsom	Banjir + longsor, Juni 2023, terdapat korban jiwa
2022	Distrik Serambakon	Banjir bandang, puluhan rumah rusak
2021	Distrik Oksibil	Longsor, akses jalan terputus, ratusan warga mengungsi

Sumber: BPBD Kabupaten Pegunungan Bintang, 2025

3.3. Kesesuaian Peran (Role Conformity) dan Keselarasan Peran (Role Congruence)

Dimensi kesesuaian peran mengkaji tingkat kesesuaian antara harapan dan pelaksanaan peran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara harapan masyarakat dan pemerintah daerah terhadap BPBD dengan kemampuan riil yang dimiliki lembaga tersebut. Harapan yang besar dari masyarakat agar BPBD mampu menjangkau seluruh wilayah rawan bencana belum dapat dipenuhi secara optimal karena keterbatasan SDM dan anggaran.

Dari sisi keselarasan peran, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh bidang dalam BPBD telah berupaya menjalankan tugas secara terpadu, terutama saat terjadi bencana. Dalam kondisi darurat, seluruh personel dikerahkan secara fleksibel tanpa batasan tugas yang kaku. Namun demikian, koordinasi antar bidang dalam situasi normal masih perlu ditingkatkan untuk memastikan pelaksanaan program mitigasi berjalan secara terintegrasi.

3.4. Faktor-Faktor Penghambat Peran BPBD

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat enam faktor utama yang menghambat pelaksanaan peran BPBD dalam mitigasi bencana longsor di Kabupaten Pegunungan Bintang:

Tabel 2.

Faktor-Faktor Penghambat Peran BPBD dalam Mitigasi Bencana Longsor

No.	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
1	Kondisi Geografis karena wilayah bergunung-gunung dan memiliki akses transportasi yang terbatas	Koordinasi dan kerja sama lintas sektor antara BPBD, TNI, Polri, Dinas PU, Dinas Kesehatan, pemerintah distrik, dan pemerintah kampung.
2	Keterbatasan SDM 42 pegawai untuk wilayah 15.683 km²; kurangnya personel terlatih di bidang manajemen kebencanaan	Komitmen seluruh personel BPBD untuk tetap menjalankan tugas secara optimal meskipun dengan keterbatasan yang ada.

No.	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
3	Keterbatasan Sarana Prasarana Minimnya kendaraan operasional, peralatan evakuasi, dan fasilitas pendukung lainnya	Keterlibatan aparat kampung dan masyarakat lokal dalam penyebaran informasi kebencanaan, sehingga terbentuk model komunikasi berbasis komunitas yang lebih efektif.
4	Keterbatasan Anggaran Alokasi dana belum optimal untuk menjangkau program mitigasi secara luas dan berkelanjutan	Pengembangan kapasitas aparatur melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BNPB dan pemerintah daerah.
5	Rendahnya Kesadaran Masyarakat Sebagian masyarakat menganggap bencana sebagai hal alami dan tidak berpartisipasi aktif dalam sosialisasi	Fleksibilitas seluruh personel BPBD dalam kondisi darurat, di mana seluruh bidang dapat bekerja secara terpadu tanpa dibatasi oleh tugas yang kaku.
6	Keterbatasan jaringan komunikasi di beberapa distrik dan kampung terpencil	Faktor pendukungnya adalah adanya pemanfaatan jaringan komunikasi berbasis masyarakat melalui aparat kampung dan kerja sama lintas sektor, sehingga informasi kebencanaan tetap dapat disampaikan kepada masyarakat di wilayah terpencil meskipun akses teknologi komunikasi masih terbatas.

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian, 2025

3.5. Upaya BPBD dalam Mengatasi Hambatan

Guna mengatasi berbagai hambatan tersebut, BPBD Kabupaten Pegunungan Bintang telah melakukan beberapa upaya strategis. Pertama, penguatan koordinasi lintas sektor dengan TNI/Polri, Dinas PU, Dinas Kesehatan, serta pemerintah distrik dan kampung, terutama saat terjadi bencana. Kedua, optimalisasi sumber daya secara bertahap dengan memaksimalkan peralatan yang tersedia dan pengerahan seluruh personel saat keadaan darurat. Ketiga, intensifikasi sosialisasi melalui aparat kampung, di mana karena keterbatasan akses wilayah, BPBD memanfaatkan kepala kampung sebagai perantara penyampaian informasi kebencanaan kepada masyarakat. Keempat, pengembangan kapasitas aparatur melalui pelatihan yang diselenggarakan BNPB dan pemerintah daerah.

Sekretaris BPBD menyatakan: "Kami memang masih terbatas alat, jadi kami manfaatkan yang ada secara maksimal. Kalau ada kejadian, semua personel langsung turun ke lapangan sesuai kebutuhan."

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat melalui aparat kampung menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan mitigasi bencana longsor di Kabupaten Pegunungan Bintang. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Madjid dan Ginting (2022) yang menyatakan bahwa manajemen risiko bencana di daerah terpencil akan

lebih efektif apabila didukung oleh pendekatan berbasis komunitas dan partisipasi masyarakat lokal. Selain itu, Djalante dan Lassa (2019) menjelaskan bahwa implementasi pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat merupakan faktor penting dalam meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap ancaman bencana.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahmandari (2023) yang menyatakan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan kunci efektivitas penanggulangan bencana. Sama halnya dengan temuan tersebut, BPBD Kabupaten Pegunungan Bintang telah berupaya membangun koordinasi lintas sektor, meskipun hasilnya belum optimal karena keterbatasan sumber daya. Temuan ini memperkuat argumen bahwa koordinasi kelembagaan yang kuat merupakan prasyarat utama efektivitas mitigasi bencana. Koordinasi lintas sektor antara BPBD, TNI, Polri, pemerintah distrik, dan pemerintah kampung yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko bencana. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Mojtahedi dan Oo (2017) yang menjelaskan bahwa keterlibatan aktif para pemangku kepentingan (stakeholders) merupakan atribut penting dalam manajemen risiko bencana yang proaktif. Hal serupa juga dikemukakan oleh Khairi (2021) bahwa efektivitas penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh koordinasi kelembagaan yang baik antarorganisasi pemerintah.

Berbeda dengan temuan Pramitha et al. (2020) yang meneliti wilayah perkotaan di Surakarta dengan infrastruktur yang relatif memadai, penelitian ini menemukan bahwa ketiadaan infrastruktur pendukung di wilayah terpencil seperti Pegunungan Bintang menjadi faktor pembeda yang krusial. Keterbatasan infrastruktur di wilayah pegunungan Papua berdampak jauh lebih signifikan terhadap efektivitas mitigasi dibandingkan di wilayah perkotaan. Belum optimalnya pelaksanaan mitigasi bencana longsor di Kabupaten Pegunungan Bintang akibat keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran menunjukkan masih terbatasnya kapasitas kelembagaan BPBD. Temuan ini sejalan dengan penelitian Lubis dan Ginting (2023) yang menyatakan bahwa kapasitas kelembagaan BPBD di wilayah pegunungan Papua sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, dukungan infrastruktur, dan kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsi penanggulangan bencana secara efektif.

Tingginya risiko bencana longsor di Kabupaten Pegunungan Bintang menuntut adanya upaya mitigasi yang berkelanjutan dan berbasis pada karakteristik lokal wilayah. Kondisi tersebut sesuai dengan pandangan Alcántara-Ayala dan Oliver-Smith (2023) yang menegaskan bahwa pengurangan risiko tanah longsor memerlukan integrasi antara ilmu pengetahuan, kebijakan, serta praktik penanggulangan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan tingkat kerentanan masyarakat setempat.Temuan ini menolak asumsi bahwa pembentukan BPBD secara otomatis menjamin efektivitas mitigasi bencana. Sebaliknya, efektivitas sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, dan kondisi geografis setempat. Hasil ini konsisten dengan argumentasi Coppola (2015) bahwa manajemen bencana yang efektif memerlukan kombinasi antara kapasitas kelembagaan yang kuat, sumber daya yang memadai, dan partisipasi masyarakat yang aktif.

Penelitian ini juga menemukan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat lokal merupakan hambatan kultural yang spesifik. Temuan ini sejalan dengan Salim dan Siswanto (2018) yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam program penanggulangan bencana. Budaya lokal masyarakat Papua Pegunungan yang cenderung menganggap bencana sebagai fenomena alam yang tidak dapat dihindari perlu mendapat perhatian khusus dalam strategi komunikasi risiko bencana. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman longsor yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana masih perlu ditingkatkan. Hal ini

sejalan dengan hasil kajian Ardalan et al. (2018) yang menyatakan bahwa kapasitas masyarakat merupakan unsur penting dalam pengurangan risiko bencana, karena masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kesiapsiagaan yang baik akan lebih mampu mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peran BPBD sebagai organisasi pemerintah daerah dalam mitigasi bencana longsor menunjukkan bahwa keberhasilan pengurangan risiko bencana tidak hanya bergantung pada respons saat terjadi bencana, tetapi juga pada pelaksanaan fungsi pencegahan dan kesiapsiagaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Lubis (2020) yang menyatakan bahwa aparatur pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pengurangan risiko bencana melalui pelaksanaan fungsi koordinasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Upaya BPBD Kabupaten Pegunungan Bintang dalam menyusun rencana kontingensi, melakukan sosialisasi, dan memperkuat koordinasi lintas sektor menunjukkan adanya langkah kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi. Temuan tersebut mendukung hasil penelitian Raikes et al. (2019) yang menjelaskan bahwa perencanaan dan kesiapsiagaan pra-bencana merupakan komponen utama dalam mengurangi risiko serta meminimalkan dampak kerugian akibat bencana.

Temuan menarik lain yang diperoleh dari penelitian ini adalah adanya inovasi berbasis komunitas yang dikembangkan BPBD dalam mengatasi keterbatasan jangkauan. Dengan memanfaatkan jaringan aparat kampung sebagai ujung tombak penyebaran informasi kebencanaan, BPBD menciptakan model desentralisasi komunikasi risiko yang adaptif terhadap kondisi geografis setempat. Pendekatan ini, meskipun bersifat informal, terbukti lebih efektif dalam menjangkau masyarakat di wilayah terpencil dibandingkan pendekatan formal yang terpusat.

Selain itu, penelitian menemukan adanya potensi konflik peran yang muncul ketika BPBD harus menjalankan fungsi mitigasi (pra-bencana) secara bersamaan dengan fungsi tanggap darurat. Keterbatasan personel menyebabkan BPBD sering kali tidak dapat memisahkan secara jelas antara tugas pencegahan dan penanggulangan, yang pada akhirnya berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan keduanya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas mitigasi bencana longsor di Kabupaten Pegunungan Bintang tidak hanya ditentukan oleh keberadaan BPBD sebagai lembaga penanggulangan bencana, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, keterlibatan masyarakat, koordinasi antar pemangku kepentingan, serta kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi. Temuan tersebut memperkuat pandangan Mojtahedi dan Oo (2017), Djalante dan Lassa (2019), Madjid dan Ginting (2022), Ardalan et al. (2018), serta Raikes et al. (2019) bahwa keberhasilan pengurangan risiko bencana memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan secara terpadu.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran BPBD dalam mitigasi bencana longsor di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, sudah berjalan namun belum berjalan secara maksimal. BPBD telah memahami

fungsi dan tujuan perannya dengan baik, serta telah melaksanakan berbagai kegiatan mitigasi pra-bencana seperti sosialisasi, pemetaan wilayah rawan, penyusunan rencana kontingensi, koordinasi lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, pelaksanaan tersebut masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana prasarana, keterbatasan anggaran, kondisi geografis yang sulit dijangkau, rendahnya kesadaran masyarakat, serta terbatasnya akses informasi dan teknologi.

Guna meningkatkan efektivitas peran BPBD dalam mitigasi bencana longsor, diperlukan penguatan alokasi anggaran dari APBD, penambahan personel yang terlatih, pengadaan sarana prasarana yang memadai termasuk sistem peringatan dini berbasis teknologi, serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui program pendidikan kebencanaan yang berkelanjutan. Sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, BPBD, komunitas lokal, dan lembaga non-pemerintah sangat diperlukan untuk mewujudkan ketangguhan bencana di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini terbatas pada satu kabupaten dengan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi secara langsung ke wilayah lain. Keterbatasan akses ke wilayah terpencil juga membatasi kemungkinan observasi langsung di lapangan secara menyeluruh.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work**).** Penelitian lanjutan disarankan untuk mencakup wilayah-wilayah kabupaten lain di Papua Pegunungan dengan karakteristik geografis serupa, serta menggunakan metode campuran (mixed methods) untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas peran BPBD dalam mitigasi bencana di wilayah terpencil.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pegunungan Bintang beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian. Terima kasih kepada Ibu Bertha Lubis, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing atas arahan, bimbingan, dan kesabarannya dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih pula kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Madjid, U., & Harimas Ginting, A. (2022). *Manajemen Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Daerah Terpencil Indonesia*. Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, 14(1), 45–62.

Djalante, R., & Lassa, J. A. (2019). *Community-based disaster risk reduction in Indonesia: From policy to practice*. International Journal of Disaster Risk Reduction, 34, 371–385.

Salim, M. A., & Siswanto, A. B. (2018). *Penanganan banjir dan rob di wilayah Pekalongan*. Jurnal Teknik Sipil, 11, 1–14.

Mojtahedi, M., & Oo, B. L. (2017). *Critical attributes for proactive engagement of stakeholders in disaster risk management*. International Journal of Disaster Risk Reduction, 21, 35–43.

A. Buku dan Jurnal Nasional

Lubis, B., & Ginting, A. H. (2023). Kapasitas Kelembagaan BPBD dalam Penanggulangan Bencana di Wilayah Pegunungan Papua. *Jurnal Ilmu Pemerintahan IPDN, 10*(2), 89–107. https://doi.org/10.33701/jip.v10i2.2845

Madjid, U., & Harimas Ginting, A. (2022). Manajemen Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Daerah Terpencil Indonesia. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, 14*(1), 45–62. https://doi.org/10.33701/japd.v14i1.2201

Khairi, H. (2021). Efektivitas Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam: Kajian Kelembagaan. *Jurnal Pemerintahan dan Politik, 6*(3), 112–130. https://doi.org/10.36982/jpg.v6i3.1785

Lubis, B. (2020). Peran Aparatur Pemerintah Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana: Perspektif Teori Peran. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 8*(1), 23–41. https://doi.org/10.30742/jiap.v8i1.986

Ginting, A. H., & Madjid, U. (2019). Strategi Penguatan Kapasitas BPBD dalam Menghadapi Ancaman Bencana di Kawasan Rawan Bencana. *Jurnal Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN, 3*(2), 67–85. https://doi.org/10.33701/jkkp.v3i2.1254

Ningrum, S., & Ginting, K. G. (2020). Strategi penanganan banjir berbasis mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana banjir di Daerah Aliran Sungai Seulalah Kota Langsa. *Geography Science Education Journal, 1*(1), 1–12.

Pramitha, A. A. S., Utomo, R. P., & Miladan, N. (2020). Efektivitas infrastruktur perkotaan dalam penanganan risiko banjir di Kota Surakarta. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif, 15*(1), 1–15.

Salim, M. A., & Siswanto, A. B. (2018). Penanganan banjir dan rob di wilayah Pekalongan. *Jurnal Teknik Sipil, 11*, 1–14.

Suhardono, E. (1994). *Teori Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

BNPB. (2020). *Pedoman Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

B. Jurnal Internasional Bereputasi Scopus

Alcántara-Ayala, I., & Oliver-Smith, A. (2023). The global landslide problem: Reducing risk through science, policy, and practice. *Progress in Disaster Science, 18*, 100278. https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2023.100278

Djalante, R., & Lassa, J. A. (2019). Community-based disaster risk reduction in Indonesia: From policy to practice. *International Journal of Disaster Risk Reduction, 34*, 371–385. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.01.007

Mojtahedi, M., & Oo, B. L. (2017). Critical attributes for proactive engagement of stakeholders in disaster risk management. *International Journal of Disaster Risk Reduction, 21*, 35–43. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2016.10.017

Ardalan, A., Holakouie-Naieni, K., Kabir, M. J., & Ahmadvand, A. (2018). Assessment of community capacity for disaster risk reduction: A systematic review. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 12*(4), 455–463. https://doi.org/10.1017/dmp.2017.56

Raikes, J., Smith, T. F., Jacobson, C., & Baldwin, C. (2019). Pre-disaster planning and preparedness for floods and droughts: A systematic review. *International Journal of Disaster Risk Reduction, 38*, 101207. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101207

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana.

Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana.

D. Sumber Lainnya

BPBD Kabupaten Pegunungan Bintang. (2025). Data Kejadian Bencana dan Dampaknya Tahun 2021–2025. Oksibil: BPBD Pegunungan Bintang.

Coppola, D. P. (2015). *Introduction to International Disaster Management* (3rd ed.). Elsevier/Butterworth-Heinemann.

Scott, W. R. (2014). *Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities* (4th ed.). SAGE Publications.

Mintzberg, H. (1990). The manager's job: Folklore and fact. *Harvard Business Review, 68*(2), 163–176.